

## SERTIFIKASI DA'I DALAM LENSE LITERASI PUBLIK: ANALISIS KRITIS PODCAST 'HOTROOM'

Abdul Hamid Aly<sup>1</sup>, Mimin Aminah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Subang, Indonesia

([abdulhamidaly@unpak.ac.id](mailto:abdulhamidaly@unpak.ac.id)<sup>1</sup>, [miminaminah@unsub.ac.id](mailto:miminaminah@unsub.ac.id)<sup>2</sup>)

### Abstract

*This study analyzes the discourse on da'i (Islamic preacher) certification through the lens of public literacy by critically examining the Hotroom podcast. The certification of da'i has become a significant discourse in Indonesia, aiming to enhance the professionalism of Islamic preaching, moderate religious teachings, and curb the spread of radicalism. However, the policy has sparked controversy concerning the freedom of religious expression and the plurality of Islam. The Hotroom podcast, as a digital medium, serves as an interactive forum that brings together diverse perspectives from legislators, religious scholars, and the public. Using a qualitative descriptive approach and critical discourse analysis, this study investigates the narratives, rhetoric, and ideologies embedded in the discussions around da'i certification. The findings reveal two dominant narratives: a positive narrative that supports certification as a step toward the professionalization of dakwah (Islamic preaching), and a critical narrative that rejects the policy on the grounds that it restricts freedom of speech. Community-based alternatives, such as non-formal training and standardization, are proposed to maintain inclusivity and local relevance. The analysis highlights the importance of collaboration between the government, religious organizations, and civil society in designing adaptive and tolerant religious policies. As a medium of public literacy, the podcast proves effective in presenting complex issues reflectively, fostering democratic dialogue, and promoting critical public awareness. This research contributes to the development of humanistic and adaptable religious policymaking in the digital age.*

**Keywords:** da'i certification, public literacy, dakwah, podcast, critical discourse.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis wacana sertifikasi da'i dalam perspektif literasi publik melalui studi kritis terhadap podcast Hotroom. Sertifikasi da'i menjadi wacana signifikan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dakwah, memoderasi ajaran keagamaan, dan menekan penyebaran radikalisme. Namun, kebijakan ini memunculkan kontroversi terkait kebebasan berdakwah dan pluralitas Islam. Podcast Hotroom sebagai medium digital menjadi ruang diskusi interaktif yang mempertemukan beragam pandangan dari legislatif, ulama, dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis wacana kritis, penelitian ini mengkaji narasi, retorika, dan ideologi yang terkandung dalam diskusi sertifikasi da'i. Temuan penelitian menunjukkan dua narasi utama: narasi positif yang mendukung sertifikasi sebagai langkah profesionalisasi dakwah, dan narasi kritis yang menolak kebijakan tersebut karena dinilai membatasi kebebasan berbicara. Alternatif berbasis komunitas, seperti pelatihan dan standarisasi non-formal, diusulkan untuk menjaga inklusivitas dan relevansi lokal. Hasil analisis menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang adaptif dan toleran. Podcast sebagai media literasi publik terbukti mampu menyampaikan isu-isu kompleks secara reflektif, membuka ruang dialog demokratis, dan mendorong kesadaran kritis masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan keagamaan yang humanis dan berdaya adaptasi dalam konteks digital.





## A. Pendahuluan

Perkembangan literasi publik di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks wacana keagamaan. Literasi publik tidak lagi hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam wacana sosial, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai medium untuk mengakses dan mendiskusikan isu-isu kompleks. Media digital, seperti podcast, telah menjadi platform baru yang memberikan ruang diskusi yang interaktif, kritis, dan inklusif. Di tengah era digital ini, podcast menonjol sebagai medium yang mampu menghubungkan isu-isu sosial, politik, dan agama dengan audiens yang lebih luas (Elizamiharti, 2023; Kustini, 2020; Rizal, 2023). Dalam konteks ini, literasi publik menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga peserta aktif dalam dialog yang bermakna (Laeli & Dzarna, 2022; T. S. Wahyuni, 2021).

Salah satu isu yang muncul sebagai sorotan utama dalam literasi publik di Indonesia adalah sertifikasi da'i. Isu ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam dakwah, menjaga moderasi keagamaan, dan mencegah penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Sertifikasi ini juga diharapkan dapat menjamin kualitas mubaligh dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang santun, moderat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Hartono et al., 2020;

Sadikin, 2024). Dalam kajian sebelumnya, Arsal et al., (2022) menegaskan pentingnya standar bagi para mubaligh agar tidak memfitnah kelompok lain dan senantiasa menyampaikan pesan keagamaan dengan pendekatan yang kultural dan tidak provokatif. Hal ini menjadi semakin penting di tengah dinamika literasi digital, di mana arus informasi keagamaan tersebar luas melalui berbagai media, termasuk podcast.

Namun, sertifikasi da'i juga menimbulkan perdebatan terkait dengan kebebasan dakwah dan pluralitas masyarakat Indonesia. Beberapa pihak menganggap bahwa sertifikasi dapat membatasi ruang gerak dakwah dan menciptakan standar homogen yang tidak selaras dengan keberagaman tradisi Islam di Indonesia (Arming, 2023; Sai'dah et al., 2022). Dalam diskursus publik, sertifikasi da'i sering kali diperdebatkan di berbagai platform digital, termasuk podcast *Hotroom*, yang menjadi salah satu medium terkemuka untuk membahas isu ini. Dengan format diskusi yang kritis dan dekat dengan realitas masyarakat, *Hotroom* menjadi jembatan antara kebijakan formal dan persepsi masyarakat terkait sertifikasi da'i (Raharjo & Winarko, 2021).

Literasi publik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami kompleksitas isu seperti sertifikasi da'i. Sebagai bagian dari literasi publik, literasi agama menekankan kemampuan individu untuk menganalisis dan mengevaluasi wacana keagamaan secara kritis. Dalam hal ini, podcast tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran kritis terhadap



narasi yang berkembang. Literasi agama yang kuat dapat membantu masyarakat membedakan antara ajaran yang inklusif dan radikal, sehingga mendukung terciptanya ruang publik yang toleran dan demokratis (Maknun et al., 2021; Sutadi, 2022).

Kajian tentang peran podcast sebagai medium literasi publik memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam tentang bagaimana narasi, ideologi, dan argumen terkait sertifikasi da'i direpresentasikan dalam diskusi digital. Dalam konteks ini, pendekatan linguistik terapan dan analisis wacana kritis sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, menyebarkan, dan menerima narasi tertentu. Sebagai pendekatan multidisipliner, linguistik terapan memungkinkan analisis mendalam terhadap bahasa, gaya retorika, dan ideologi dalam diskusi digital seperti podcast *Hotroom* (Bulan & Kasman, 2018; Choiriyati et al., 2019; Gasa, 2019). Pendekatan ini juga memberikan wawasan tentang relasi kuasa dan kepentingan yang terkandung dalam wacana tersebut (Fiqri et al., 2020; Rhizky, 2021).

Dalam konteks pendidikan keagamaan, sertifikasi da'i dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas dakwah sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman agama yang moderat, toleran, dan inklusif. Lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan majelis taklim, menjadi pilar penting dalam membekali masyarakat dengan literasi agama yang bertanggung

jawab (Munir, 2020; Suswandy, 2023). Namun, tantangan muncul ketika konsep sertifikasi berbenturan dengan tradisi keagamaan lokal yang bersifat informal. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat menjadi penting untuk menjamin bahwa sertifikasi da'i tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga relevan dengan konteks lokal (Sriyanti & Ramadhani, 2021; Tholkhah, 2013).

Perubahan dinamika literasi publik di era digital juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu keagamaan. Pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat perlu bersinergi untuk meningkatkan literasi digital, literasi media, dan literasi agama di kalangan generasi muda. Literasi publik yang baik akan meminimalkan penyebaran informasi yang bias dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara kritis dalam wacana publik (Rahman et al., 2022; Yahya, 2023).

Dalam penelitian ini, sertifikasi da'i akan dianalisis dari perspektif literasi publik dengan fokus pada bagaimana isu ini direpresentasikan dalam podcast *Hotroom*. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara literasi publik dan wacana keagamaan, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang peran media digital dalam membentuk opini publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan pendidikan keagamaan di era digital.



Transformasi literasi publik dalam konteks era digital menunjukkan bahwa masyarakat modern membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan membaca dan menulis. Literasi kini mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kompleks yang sering kali disampaikan melalui berbagai media digital. Dalam hal ini, media seperti podcast menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman kolektif terkait isu-isu sosial dan keagamaan yang kompleks (Kustini, 2020; H. C. Wahyuni et al., 2023). Podcast *Hotroom*, misalnya, menghadirkan diskusi interaktif yang menggabungkan opini kritis, wawasan ahli, dan narasi inklusif. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi generasi milenial yang lebih akrab dengan teknologi dan format media digital yang dinamis (Laeli & Dzarna, 2022; Raharjo & Winarko, 2021).

Dalam isu sertifikasi da'i, literasi publik memainkan peran kunci dalam mengurangi kesalahpahaman dan bias yang dapat muncul dari kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang sertifikasi sebagai upaya untuk mengontrol kebebasan dakwah atau membatasi pluralitas tradisi Islam. Namun, dengan literasi yang memadai, masyarakat dapat memahami bahwa sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dakwah dan menghindari penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan (Hartono et al., 2020; Rahman et al., 2022). Peran media digital, seperti podcast, sangat penting dalam menjelaskan narasi ini secara kritis namun inklusif, sehingga membuka ruang dialog yang lebih demokratis antara pemerintah,

organisasi keagamaan, dan masyarakat (Sadikin, 2024; Sai'dah et al., 2022).

Selain itu, sertifikasi da'i dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat peran pendidikan keagamaan dalam masyarakat modern. Lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan universitas berbasis agama, telah lama menjadi benteng utama dalam membentuk pemahaman agama yang moderat dan inklusif. Namun, dengan berkembangnya teknologi, pendidikan keagamaan perlu beradaptasi agar mampu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulumnya (Munir, 2020; Suswandy, 2023). Guru-guru agama, misalnya, dituntut untuk tidak hanya menguasai konten ajaran agama, tetapi juga memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif (Sobri et al., 2022; Yahya, 2023).

Pada akhirnya, analisis linguistik terapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana narasi dan retorika terkait sertifikasi da'i dibentuk dalam media digital. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ideologi, kekuasaan, dan kepentingan yang terkandung dalam narasi yang disampaikan melalui platform seperti podcast (Choiriyati et al., 2019; Gasa, 2019). Dengan menggunakan analisis wacana kritis, penelitian ini tidak hanya akan mengungkap pola bahasa dan retorika yang digunakan dalam diskusi sertifikasi da'i, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat merespons isu tersebut di era digital (Rhizky, 2021; Sutadi, 2022). Pemahaman



ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam representasi wacana sertifikasi da'i dalam podcast Hotroom. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi makna, narasi, dan strategi retorika yang digunakan dalam diskusi, sehingga memungkinkan pengungkapan bagaimana bahasa dan retorika dalam media digital dapat membentuk persepsi audiens terhadap isu yang kompleks (Rahayu, 2020; Wijaya et al., 2021).

Sebagaimana dinyatakan oleh Rahayu, (2020), pendekatan kualitatif sangat cocok untuk penelitian berbasis linguistik, terutama ketika bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks tertentu (Rahayu, 2020). Pendekatan ini mengacu pada struktur penelitian kualitatif berbasis linguistik, dengan penekanan pada analisis data yang iteratif dan interpretatif (Musahrain et al., 2023). Proses ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap data yang dikumpulkan, dengan langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan hingga analisis dan interpretasi, serta triangulasi data untuk memastikan validitas temuan (Kolbi et al., 2020; Wijaya et al., 2021).

Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan berupa transkrip episode podcast Hotroom yang membahas isu sertifikasi da'i. Data ini mencakup tuturan host, narasumber, dan respons audiens yang direkam dalam episode tertentu

(Santiawan & Supriyoko, 2022). Data ini bersifat primer karena langsung diambil dari sumber diskusi yang menjadi objek kajian. Selain itu, data sekunder berupa artikel, literatur, dan laporan kebijakan terkait sertifikasi da'i, serta kajian tentang literasi publik dan media digital, digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap analisis (Fadli, 2023; Mahastama, 2022).

Kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh, baik dari perspektif empiris maupun teoritis (Rasminto, 2023). Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mendengarkan dan mentranskrip episode podcast secara manual untuk memastikan keakuratan data linguistik yang terkandung (Yasa, 2023). Langkah ini juga mencakup identifikasi segmen-segmen relevan berdasarkan tema diskusi, strategi retorika, dan pola penggunaan bahasa yang muncul dalam podcast. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup artikel dan penelitian terdahulu yang relevan (Arifin, 2023). Studi pustaka ini mendukung analisis teoritis dan memberikan pemahaman tambahan tentang konteks sosial dan kebijakan yang melatarbelakangi wacana sertifikasi da'i.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis atau CDA). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi bagaimana bahasa mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan representasi publik dalam



diskusi terkait sertifikasi da'i (Desselle & McKeirnan, 2019; Kaloi et al., 2022; Liu & Dzainudin, 2023).

Perry (2012) menjelaskan bahwa analisis wacana kritis mencakup tiga level utama, yaitu analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosio-kultural (Estrada et al., 2019; Rusdi, 2023; Sandberg, 2020). Analisis teks berfokus pada elemen-elemen linguistik seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan dalam wacana (Munthe et al., 2023).

Pada level praktik wacana, penelitian mengeksplorasi bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial tertentu (Baba, 2023; Davianti, 2023; Rahayu, 2020). Sementara itu, analisis praktik sosio-kultural menghubungkan temuan linguistik dan praktik wacana dengan isu-isu ideologis, kekuasaan, dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam diskusi tersebut (Astoro, 2023; Fathuddin, 2023; Kharismatunisa, 2023).

Pelaksanaan analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan dan transkripsi data dilakukan sebagai dasar analisis (Darmawan, 2023; Yener, 2022). Selanjutnya, penelitian berlanjut ke analisis fitur bahasa dalam teks, seperti pilihan retorika dan gaya komunikasi yang digunakan oleh host maupun narasumber (Rasminto, 2023; Solichin et al., 2023). Hasil analisis ini kemudian dikontekstualisasikan dengan menghubungkan temuan linguistik dengan isu sosial, kebijakan, dan budaya yang melingkupi topik sertifikasi da'i (Bai, 2023; kareem & Shakir, 2023; Lopatofsky, 2023).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan triangulasi data yang melibatkan perbandingan antara berbagai sumber data, baik primer maupun sekunder (Ardianti et al., 2022). Teknik ini membantu menjaga keakuratan temuan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan kajian-kajian sebelumnya. Perry (2012) menekankan pentingnya dokumentasi setiap langkah penelitian, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga interpretasi data, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penelitian.

Dalam penelitian kualitatif seperti ini, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama. Perry (2012) menekankan pentingnya sensitivitas peneliti terhadap konteks data yang dianalisis. Dengan memahami dinamika sosial dan bahasa yang ada, peneliti dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan. Untuk menjaga fokus penelitian, digunakan panduan analisis berupa checklist berbasis teori literasi publik, analisis wacana kritis, dan filsafat bahasa.

Penelitian ini berlokasi pada episode podcast *Hotroom*, sebuah program diskusi populer yang sering membahas isu-isu sosial dan keagamaan. Episode yang menjadi objek penelitian berfokus pada tema sertifikasi da'i, yang dibahas dalam format dialog interaktif. Konteks penelitian ini melibatkan audiens yang beragam, baik dari segi latar belakang sosial maupun pandangan keagamaan, sehingga mencerminkan beragamnya persepsi terhadap isu ini di ruang digital.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika dengan mematuhi prinsip-prinsip



penggunaan data yang berasal dari sumber publik. Data yang digunakan berasal dari media yang tersedia secara umum, namun penelitian ini tetap menjaga integritas konten asli dan mengedepankan interpretasi yang humanis.

Melalui metode yang sistematis ini, penelitian mampu mengungkap bagaimana bahasa dan retorika dalam podcast memengaruhi persepsi audiens terhadap isu sertifikasi da'i. Kombinasi teori literasi publik, analisis wacana kritis, dan filsafat bahasa memberikan kerangka yang kokoh untuk memahami fenomena ini. Dengan mengintegrasikan berbagai langkah penelitian yang transparan dan etis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami isu keagamaan dalam konteks wacana digital.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Temuan Struktur Dan Deskripsi Data

Isu sertifikasi da'i mencuat sebagai respons atas kontroversi yang dipicu oleh ceramah publik Gus Miftah yang dianggap tidak pantas. Insiden tersebut menyoroti perlunya profesionalisme dalam dakwah, mendorong diskusi terkait sertifikasi sebagai langkah untuk memastikan kompetensi penceramah. Dalam Podcast *Hotroom*, isu ini dibahas secara mendalam melalui perspektif berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan organisasi keagamaan. Struktur diskusi podcast ini mencerminkan teori literasi publik oleh Kustini (2020), yang menekankan pentingnya dialog dalam memahami isu-isu kompleks, termasuk pengenalan isu, argumentasi pro-kontra, dan solusi alternatif.

Diskusi dimulai dengan pengantar tentang wacana sertifikasi, menyoroti pertanyaan mendasar tentang otoritas, mekanisme, dan dampaknya terhadap kebebasan berbicara. Argumen pro-sertifikasi, seperti yang disampaikan Kang Maman dari DPR, menekankan pentingnya standar minimum untuk memastikan penceramah memiliki wawasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perspektif ini selaras dengan literasi publik oleh H. C. Wahyuni et al., (2023), yang menggarisbawahi kebutuhan akan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pendakwah. Namun, kritik juga muncul, terutama dari Kamaruddin Amin dan Cholil Nafis, yang menyebutkan bahwa sertifikasi formal dapat mengancam pluralisme dan kebebasan berdakwah, sebagaimana ditegaskan oleh Elizamiharti, (2023).

Sebagai alternatif, standarisasi yang lebih fleksibel diusulkan oleh MUI, mencakup pedoman minimum terkait moderasi dan metode dakwah tanpa membatasi kebebasan individu. Pendekatan ini, menurut Nugraha, (2022), mengedepankan pemberdayaan kolektif, di mana masyarakat dan organisasi keagamaan berperan aktif dalam menentukan kualitas penceramah. Solusi seperti pelatihan berbasis komunitas dan edukasi publik dianggap mampu meningkatkan kualitas dakwah tanpa menciptakan resistensi sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Raharjo & Winarko, (2021), yang menyoroti pentingnya pembinaan komunitas dalam membangun dakwah yang moderat.

Kesimpulan dari diskusi menyatakan bahwa peningkatan kualitas



pendakwah adalah kebutuhan mendesak, tetapi sertifikasi formal bukanlah solusi yang ideal untuk masyarakat Indonesia yang multikultural. Standarisasi dan pembinaan berbasis komunitas menjadi opsi yang lebih humanis dan inklusif. Refleksi ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan profesionalisme dalam dakwah dan penghormatan terhadap kebebasan berbicara, sesuai pandangan Yahya, (2023) bahwa literasi keagamaan yang baik harus mendukung pluralisme dan stabilitas sosial.

sertifikasi bagi pendakwah/dai akibat kasus Gus Miftah. Pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak terkait sertifikasi dai. Perdebatan tentang kebebasan berdakwah, kompetensi penceramah, dan kontrol terhadap kualitas dakwah. Isu sertifikasi sebagai kontrol negara versus peningkatan kapasitas dai.

<b>Durasi Video</b>	43:00 Menit
<b>URL You Tube</b>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QlbuNE-sthg">https://www.youtube.com/watch?v=QlbuNE-sthg</a>

**Tabel 1. Deskripsi data**

Jenis Identitas	Keterangan
<b>Judul</b>	Uji Da'i Lewat Sertifikasi
<b>Tanggal Publikasi</b>	11 Desember 2024
<b>Isu Utama</b>	Sertifikasi bagi pendakwah atau dai untuk memastikan kualitas ceramah yang baik dan tidak menimbulkan kontroversi.
<b>Target Pembaca/Penonton</b>	Masyarakat umum, khususnya yang tertarik dengan isu keagamaan, kebijakan publik, dan diskusi kontemporer.
<b>Sponsor/Kontributor</b>	Kopi Luwak
<b>Pengarang</b>	Hotman Paris (sebagai host acara).
<b>Penerbit/Program</b>	Metro TV, Hot Room.
<b>Narasumber</b>	Kang Maman Imanul Haq (Anggota DPR Fraksi PKB) Kamaruddin Amin (Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia) Cholil Nafis (Majelis Ulama Indonesia) Ahmad Nur Hidayat (Pengamat Kebijakan publik) Hendri Satrio (Pakar Komunikasi Politik)
<b>Konten Utama</b>	Polemik tentang usulan

**Gambar 1. Cover Youtube Hotroom MetroTV**



**2. Pembahasan**

**1) Representasi Sertifikasi Da'i dalam Podcast**

**a. Narasi Positif: Sertifikasi Da'i Sebagai Langkah Profesionalisasi**

Sertifikasi da'i diusulkan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas dakwah. Langkah ini dianggap mampu menyiapkan para da'i yang berpengetahuan luas, berwawasan kebangsaan, dan mampu berdakwah secara moderat serta toleran. Sertifikasi dipandang sebagai upaya untuk menciptakan standar minimum bagi para da'i agar memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan kemampuan



menyampaikan dakwah dengan logis serta sejuak. Dalam diskusi podcast, Menteri Agama menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas da'i melalui pelatihan terhadap 12.000 penceramah telah dilakukan sebagai bagian dari langkah menuju profesionalisasi dakwah.

Langkah ini sesuai dengan teori literasi publik yang dikemukakan oleh Kustini, (2020) dan Elizamiharti, (2023), yang menekankan bahwa literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca teks, tetapi juga keterampilan kritis untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu kompleks. Dalam konteks sertifikasi da'i, hal ini berarti membekali para penceramah dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan agama secara cerdas dan relevan, serta mampu menjawab tantangan global seperti radikalisme dan ujaran kebencian.

Selain itu, sertifikasi diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan mimbar dakwah oleh individu yang tidak memiliki kapasitas yang cukup, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh konten ceramah yang kurang edukatif. Dalam konteks ini, sertifikasi menjadi bagian dari strategi moderasi agama yang mendukung maqasid syariah, khususnya *hifzul 'aql* (memelihara akal sehat). Sertifikasi dirancang agar dakwah tidak diisi dengan takhayul, ujaran kebencian, atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama dan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Raharjo & Winarko, (2021) yang menyebutkan bahwa moderasi dalam dakwah adalah salah satu elemen kunci untuk memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain sebagai langkah profesionalisasi, sertifikasi juga dipandang sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dan mengurangi radikalisme. Hal ini dinilai relevan di tengah tantangan dakwah modern yang sering kali diwarnai dengan ujaran kebencian atau ekstremisme. Dalam podcast, beberapa pihak, seperti DPR dan Kementerian Agama, menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mengelola pelatihan dan sertifikasi da'i secara adil, transparan, dan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini juga mencerminkan prinsip yang diungkapkan oleh H. C. Wahyuni et al., (2023) bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat literasi publik sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan.

#### **b. Narasi Kritis: Sertifikasi sebagai Birokratisasi Agama**

Kritik terhadap sertifikasi da'i menyoroti potensi kebijakan ini menjadi instrumen negara yang membatasi kebebasan dakwah dan berbicara, yang bertentangan dengan konstitusi. Beberapa narasumber dalam podcast mencatat bahwa sertifikasi berisiko menjadi seperti Surat Izin Berceramah, yang sulit diterapkan dalam masyarakat plural seperti Indonesia dengan ribuan majelis taklim dan masjid. Dalam analisis wacana kritis Fairclough (1992), bahasa dalam narasi ini mencerminkan ideologi perlawanan terhadap kontrol negara yang dapat mengancam kebebasan beragama. Narasi seperti "sertifikasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kebebasan" mencerminkan resistensi



terhadap kekuasaan yang membatasi kebebasan individu, sebagaimana dijelaskan oleh Choiriyati et al., (2019), bahwa literasi media membantu masyarakat mengevaluasi kebijakan yang memengaruhi kebebasan berbicara.

Sebagai alternatif, narasi kritis mengusulkan pendekatan berbasis komunitas, seperti kontrol kolektif masyarakat untuk memilih da'i yang berkompeten. MUI, misalnya, telah melaksanakan pelatihan dan standarisasi tanpa menjadikannya syarat wajib untuk berceramah, yang menurut Elizamiharti, (2023) merupakan pendekatan literasi keagamaan yang lebih inklusif. Pendekatan ini juga mencerminkan literasi kritis Nugraha, (2022), yang mendorong masyarakat untuk secara mandiri mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kritik ini mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu formal dan kaku tidak relevan dengan pluralisme Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Kamaruddin Amin, yang menekankan pentingnya pendekatan adaptif untuk menciptakan ekosistem dakwah yang sehat dan harmonis.

## 2) Keterkaitan dengan Teori Literasi dan Wacana

Representasi wacana sertifikasi da'i dalam podcast mencerminkan dua narasi besar: narasi positif yang menekankan sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalitas dakwah, mendukung nilai moderasi, dan meminimalkan penyalahgunaan mimbar agama, sesuai dengan teori literasi publik yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam isu-isu kompleks; serta narasi kritis yang

mencerminkan resistensi terhadap kekuasaan negara yang dianggap dapat membatasi kebebasan individu, selaras dengan literasi kritis yang mendorong evaluasi independen terhadap kebijakan. Dalam konteks pluralisme Indonesia, pendekatan berbasis komunitas dan standarisasi minimal dipandang sebagai solusi inklusif dan adaptif, mencerminkan kebutuhan dialog untuk menyeimbangkan profesionalisasi dan kebebasan dalam dakwah.

**Tabel 2. Representasi Sertifikasi Da'i dalam Podcast**

Dimensi	Narasi Positif	Narasi Kritis
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dakwah.	Berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berbicara.
<b>Implementasi</b>	Kolaborasi dengan organisasi keagamaan, standar minimum keilmuan.	Sulit diterapkan secara luas di Indonesia yang plural dan beragam.
<b>Kritik yang Ditangani</b>	Mengurangi radikalisme, ujaran kebencian, dan hoaks.	Berisiko menjadi alat kontrol negara atau politisasi agama.
<b>Dampak bagi Dakwah</b>	Menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan kebangsaan.	Menimbulkan resistensi dari komunitas keagamaan.
<b>Alternatif</b>	Pelatihan berbasis kolaborasi dengan pemerintah dan ormas.	Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tanpa sertifikasi formal.

## 3) Strategi Retorika yang Digunakan dalam Podcast



Strategi retorika dalam diskusi podcast mengenai sertifikasi da'i menggabungkan elemen seperti analogi, pertanyaan retorik, dan cerita pengalaman pribadi untuk mendukung argumen narasumber dan menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Pendekatan ini penting dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara narasumber dan audiens yang heterogen. Sesuai dengan pandangan H. C. Wahyuni et al., (2023), media digital seperti podcast dapat menjadi platform yang inklusif dan efektif dalam membangun literasi publik. Strategi ini membantu menjadikan isu kompleks lebih mudah dipahami.

Analogi digunakan untuk menyederhanakan konsep sertifikasi da'i, dengan membandingkannya dengan mekanisme yang lebih akrab bagi masyarakat, seperti surat izin mengemudi (SIM). Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Choiriyati et al., (2019), membuat informasi lebih relevan secara sosial dan kontekstual, menciptakan kesan bahwa sertifikasi adalah langkah logis untuk menjaga kualitas dakwah. Pertanyaan retorik, seperti "Apakah kita ingin penceramah yang hanya asal berbicara tanpa memahami konsekuensi sosial?" juga merangsang refleksi audiens, mendorong mereka untuk berpikir mandiri dan mengevaluasi argumen secara kritis, sebagaimana dianjurkan oleh teori literasi kritis Nugraha, (2022).

Selain itu, narasi pengalaman pribadi memperkuat hubungan emosional antara narasumber dan audiens, memberikan dimensi humanis dalam diskusi. Sebagaimana dicatat oleh Gasa, (2019), cerita pribadi meningkatkan

kredibilitas pembicara sekaligus membantu audiens memahami relevansi sertifikasi tanpa kesan kontrol yang represif. Kombinasi strategi ini memungkinkan narasumber untuk menyampaikan argumen secara persuasif dan inklusif, menciptakan suasana dialogis yang, menurut Elizamiharti, (2023), menjadi inti dari literasi publik di era digital.

#### 4) Pola Argumen yang Berorientasi pada Audiens

Dalam diskusi podcast, pola argumen yang digunakan oleh narasumber secara eksplisit berorientasi pada audiens. Hal ini menunjukkan sensitivitas terhadap latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan pemahaman agama audiens yang beragam. Pendekatan ini mencerminkan prinsip inklusivitas yang diungkapkan oleh Kustini, (2020), yang menyatakan bahwa literasi publik harus memungkinkan semua segmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi sosial yang kompleks.

Salah satu pola argumen yang dominan adalah penggunaan bahasa sederhana yang tetap mencerminkan kedalaman substansi diskusi. Narasumber sering menghindari istilah teknis yang sulit dipahami, menggantinya dengan istilah yang lebih familiar bagi masyarakat umum. Hal ini tidak hanya membantu memperluas jangkauan audiens tetapi juga menciptakan suasana diskusi yang inklusif. Menurut Raharjo & Winarko, (2021), pendekatan ini penting dalam meningkatkan literasi digital, di mana komunikasi yang sederhana namun substansial dapat mendorong partisipasi aktif dari audiens yang heterogen.



Selain itu, narasumber juga menunjukkan sensitivitas terhadap nilai-nilai dan keyakinan audiens. Dalam diskusi, mereka sering kali menekankan bahwa sertifikasi bukanlah alat untuk membungkam kebebasan dakwah, melainkan upaya untuk meningkatkan kualitas dakwah demi kepentingan bersama. Dengan menekankan manfaat kolektif, narasumber berhasil membingkai isu sertifikasi sebagai sesuatu yang relevan bagi semua pihak, tanpa memunculkan kesan pemaksaan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Sutadi, (2022), yang menekankan pentingnya membangun argumen dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya audiens.

Pengakuan terhadap pluralitas audiens juga menjadi pola argumen yang sering terlihat dalam diskusi podcast. Dalam transkrip, narasumber dari MUI menyebutkan bahwa standarisasi dakwah dapat menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif dibandingkan dengan sertifikasi formal. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan dan pandangan yang berbeda-beda. Menurut Fairclough (1992), pengakuan terhadap keragaman ini mencerminkan penggunaan bahasa sebagai alat untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan inklusif dalam masyarakat pluralistik.

Pendekatan yang berorientasi pada audiens ini juga terlihat dalam cara narasumber merespons kritik atau pertanyaan. Dalam beberapa kasus, mereka menyoroti poin-poin kesepakatan terlebih dahulu sebelum menjelaskan perbedaan pendapat mereka. Strategi ini mencerminkan semangat dialog yang

inklusif dan partisipatif, yang menurut Elizamiharti, (2023) merupakan inti dari literasi publik yang efektif. Dengan cara ini, diskusi tidak hanya menjadi lebih konstruktif tetapi juga mendorong audiens untuk terlibat secara aktif.

Melalui pola argumen yang berorientasi pada audiens, narasumber dalam podcast berhasil menyampaikan isu sertifikasi da'i dengan cara yang relevan dan inklusif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa media seperti podcast memiliki potensi besar untuk menjadi platform literasi publik, di mana isu-isu kompleks dapat didiskusikan secara reflektif dan transformatif. Hal ini mencerminkan pandangan Yahya, (2023), yang menyatakan bahwa literasi digital yang efektif memerlukan komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga memberdayakan audiens untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif.

### 3. Ideologi yang Terkandung dalam Wacana Sertifikasi Da'i

#### 1) Bahasa sebagai Representasi Kekuasaan

Bahasa dalam wacana sertifikasi da'i mencerminkan relasi kekuasaan antara negara, institusi agama, dan masyarakat, dengan narasi tentang pelatihan dan standarisasi sebagai upaya negara mengatur kualitas dakwah untuk mencegah penyalahgunaan mimbar agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Kustini, (2020), negara memposisikan diri sebagai pengarah diskursus agama agar sejalan dengan prinsip kebangsaan dan moderasi, meski analisis wacana kritis Fairclough (1992) mencatat bahwa kebijakan seperti ini dapat memunculkan ketegangan antara kontrol negara dan



kebebasan individu. Kritik terhadap ideologi kontrol ini diungkapkan oleh MUI, yang menyoroti potensi sertifikasi melanggar kebebasan berbicara dan beragama, sesuai dengan pandangan Elizamiharti, (2023), bahwa literasi publik harus menghormati kebebasan individu dalam wacana sosial tanpa tekanan berlebihan. Pernyataan seperti "sertifikasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kebebasan" menegaskan pentingnya kebijakan yang menghormati pluralitas dan kebebasan beragama, bukan hanya melindungi masyarakat.

## 2) Otoritas Agama dan Legitimasi Narasi

Bahasa dalam wacana sertifikasi mencerminkan ideologi otoritas agama sebagai pusat legitimasi dalam diskusi. Keterlibatan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam proses sertifikasi menunjukkan peran otoritas agama dalam memberikan validasi terhadap kebijakan keagamaan. Sebagaimana dicatat oleh Gasa, (2019), otoritas agama sering kali menjadi pengarah wacana publik, khususnya dalam isu-isu keagamaan. Misalnya, narasi tentang standarisasi minimal oleh MUI mencerminkan upaya otoritas agama untuk menentukan standar moral dan keilmuan bagi para da'i. Narasumber dari MUI menegaskan bahwa standar ini bertujuan memastikan penceramah memiliki wawasan moderasi dan kebangsaan yang benar, sesuai konsep moderasi beragama oleh Sutadi, (2022), di mana otoritas agama berfungsi sebagai pengawal moralitas masyarakat.

Namun, ideologi otoritas agama ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam mengontrol penyimpangan dakwah

di tingkat akar rumput. Kritik dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa ketergantungan pada mekanisme kontrol komunitas atau kesadaran kolektif masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan otoritas formal. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran ideologi ke arah pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh H. C. Wahyuni et al., (2023), bahwa literasi publik berbasis komunitas dapat menjadi alat yang lebih inklusif dan adaptif dalam mengelola isu-isu keagamaan.

## 3) Kebebasan Individu dalam Wacana Keagamaan

Diskusi tentang sertifikasi da'i mencerminkan perdebatan antara upaya meningkatkan kualitas dakwah dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Narasumber dari DPR dan Kementerian Agama menegaskan bahwa sertifikasi adalah "ikhtiar, bukan kontrol," sebuah langkah untuk melindungi masyarakat tanpa melanggar kebebasan beragama. Namun, pandangan kritis dari MUI menyoroti kekhawatiran bahwa sertifikasi dapat menciptakan eksklusivitas, membatasi kebebasan individu untuk berdakwah, dan bertentangan dengan hak konstitusional kebebasan beragama. Perspektif ini sejalan dengan literasi kritis yang dijelaskan Nugraha, (2022), yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengevaluasi dan menyampaikan informasi tanpa tekanan. Dalam konteks pluralisme Indonesia, beberapa narasumber menekankan bahwa kebijakan seragam tidak realistis, mengingat keberagaman masyarakat. Hal ini mendukung teori literasi publik oleh



Haron et al., (2019), yang menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan inklusif dalam masyarakat pluralistik.

#### 4) Bahasa dan Ideologi dalam Diskursus Digital

Diskusi tentang sertifikasi da'i dalam podcast juga mencerminkan bagaimana bahasa yang digunakan di ruang digital dapat memengaruhi pembentukan ideologi. Podcast sebagai medium diskusi memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan argumen mereka secara bebas dan interaktif. Sebagaimana dijelaskan oleh H. C. Wahyuni et al., (2023), media digital seperti podcast dapat menjadi platform untuk membangun literasi publik yang lebih inklusif, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan format digital.

Penggunaan bahasa informal namun argumentatif dalam podcast mencerminkan upaya untuk mendekati wacana ini kepada audiens yang lebih luas. Frasa-frasa seperti "ini tentang mencerdaskan bangsa" atau "kita harus berpikir tentang masa depan dakwah" digunakan untuk menciptakan kesan bahwa sertifikasi adalah bagian dari upaya kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik. Narasi seperti ini mencerminkan ideologi progresif yang mengedepankan pendidikan, moderasi, dan profesionalisme dalam dakwah, sejalan dengan konsep literasi media oleh Choiriyati et al., (2019).

Namun, ruang digital juga memungkinkan adanya fragmentasi ideologi. Dalam podcast, beberapa narasumber mengkritik bagaimana media sosial sering kali digunakan untuk

menyebarkan narasi intoleransi atau ujaran kebencian. Frasa seperti "kita harus menguasai media sosial untuk kebaikan" mencerminkan pandangan bahwa ruang digital adalah medan baru untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan damai. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana diskursus digital tidak hanya mencerminkan ideologi yang ada tetapi juga menjadi alat untuk membentuk dan menyebarkan ideologi baru yang relevan dengan era modern.

#### 5) Literasi Publik Terkait Isu Sertifikasi Da'i

Podcast *Hotroom* memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi publik terkait isu sertifikasi da'i dengan menghadirkan diskusi kritis dan inklusif. Melalui narasumber yang beragam, seperti anggota DPR, ulama, dan pengamat kebijakan publik, podcast ini mengupas manfaat sertifikasi sebagai mekanisme untuk meningkatkan profesionalisme dakwah dan menjaga moderasi keagamaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori literasi publik yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memahami isu-isu kompleks (Wissang, 2023). Narasi pro-sertifikasi menyoroti pentingnya kompetensi da'i dalam menyampaikan ceramah yang relevan dengan nilai-nilai kebangsaan, sesuai pandangan Elizamiharti (2023), bahwa literasi publik membantu menciptakan ruang dialog yang edukatif dan moderat.

Namun, podcast ini juga memberikan ruang bagi narasi kritis yang menyoroti kekhawatiran tentang potensi sertifikasi menjadi alat kontrol negara terhadap kebebasan berdakwah. Dalam teori literasi kritis, resistensi terhadap



kekuasaan yang membatasi kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari evaluasi publik terhadap kebijakan (Raharjo & Winarko, 2021). Narasumber dalam podcast mengusulkan alternatif, seperti standarisasi berbasis komunitas yang lebih inklusif dan tidak mengurangi pluralitas tradisi Islam di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa literasi agama yang baik membantu masyarakat membedakan narasi inklusif dari narasi yang eksklusif (Elizamiharti, 2023).

Strategi retorika yang digunakan dalam podcast, seperti analogi, pertanyaan retorik, dan narasi pengalaman pribadi, membantu menyederhanakan konsep sertifikasi da'i bagi audiens yang heterogen. Sebagai contoh, analogi dengan standar profesional di bidang lain menjelaskan relevansi kebijakan ini, sesuai teori literasi media yang menekankan pentingnya strategi komunikasi yang efektif (Choiriyati et al., 2019). Dengan memadukan teori literasi publik dan agama, podcast ini tidak hanya memperluas wawasan audiens tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap dampak sosial dari kebijakan sertifikasi da'i (Wissang, 2023).

#### D. Penutup

#### Kesimpulan

Literasi publik dalam era digital memiliki peran sentral dalam memahami isu sertifikasi da'i di Indonesia. Sertifikasi ini diusulkan untuk meningkatkan profesionalisme dakwah dengan menciptakan da'i yang moderat dan toleran. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama terkait kebebasan berbicara dan pluralitas masyarakat

Indonesia. Diskusi dalam podcast *Hotroom* menyoroti bahwa sertifikasi da'i diperlukan untuk memberikan standar dalam dakwah, tetapi sekaligus mengundang kritik tentang relevansi kebijakan ini dalam konteks kebebasan beragama. Kritik mencatat potensi sertifikasi menjadi alat birokrasi yang membatasi kebebasan individu. Sebagai solusi, pendekatan berbasis komunitas seperti standarisasi minimum dianggap lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dakwah tanpa mengorbankan hak konstitusional kebebasan berbicara. Media digital seperti podcast, dengan kemampuan menghadirkan narasi edukatif dan humanis, menjadi platform penting dalam membangun literasi publik yang inklusif.

Rekomendasi yang muncul dari diskusi ini adalah peningkatan literasi publik melalui edukasi yang melibatkan pemerintah, organisasi keagamaan, dan media digital. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah diusulkan untuk menciptakan pembinaan fleksibel yang menghormati keberagaman tradisi lokal. Pemerintah dan pemangku kebijakan juga harus memastikan kebijakan sertifikasi dirancang dengan prinsip inklusivitas dan relevansi terhadap dinamika masyarakat Indonesia. Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah yang moderat dan inklusif, sementara mekanisme kontrol kolektif dapat memperkuat peran masyarakat dalam memastikan kualitas penceramah. Dengan pendekatan ini, profesionalisme dakwah dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan,



menciptakan harmoni sosial yang mendukung keberagaman dan stabilitas di tengah pluralitas masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

- Ardianti, A., Arisa, A., Fitriani, F., & Irmayanti, I. (2022). Kontribusi Majelis Da'i Muda Sebagai Pelopor Jalur Terang Studi Islam Di Kabupaten Sinjai. *Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(2), 185–192. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v6i2.445>
- Arifin, J. (2023). Peranan Media Digital Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(1), 8–16. <https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.202>
- Arming, A. (2023). Strategi Dakwah Dalam Membina Kesadaran Beragama Masyarakat (Studi Kasus Majelis Taklim Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone). *Jurnal Mimbar Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 9(2), 59–69. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v9i2.2192>
- Arsal, A., Elfiani, E., & Imran, M. (2022). Pemberdayaan Profesi Hakim Pada Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Pasca Perubahan Gelar Akademik. *Jurnal Dedikasia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30983/dedikasia.v2i1.5540>
- Astoro, T. (2023). The Impact of Teacher Certification, Academic Supervision, and Teaching Facilities on Improving the Quality of Education With Learning Quality as an Intervening Variable in Vocational Schools Around Grobogan Regency. *International Journal of Research and Review*, 10(10), 127–136. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20231017>
- Baba, M. A. (2023). Religious Moderation: Concept and Implementation in State Islamic Religious Universities. *Al-Ulum*, 23(2), 426–441. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4139>
- Bai, J. (2023). Future Prospects of Artificial Intelligence in Education: A Preliminary Analysis of Educator Perspectives From Focus Groups in Japan, Spain, and Germany. *Ubiquity Proceedings*. <https://doi.org/10.5334/uproc.74>
- Bulan, A., & Kasman, K. (2018). Critical Discourse Analysis of Ahok's Speech in Kepulauan Seribu. *Transformatika Jurnal Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, 2(1), 50. <https://doi.org/10.31002/transformatika.v2i1.555>
- Choiriyati, W., Rufaidah, V. W., & Turistiati, A. T. (2019). Literasi Media Siswa Dalam Penggunaan Internet Di Sekolah Alam Bogor. *Lugas Jurnal Komunikasi*, 1(2), 108–118. <https://doi.org/10.31334/ljk.v1i2.440>
- Darmawan, A. (2023). Paradigm Changes in Patterns of Islamic Religious Education During the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(02). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-55>



- Davianti, A. (2023). Minat Mahasiswa Dan Sertifikasi Profesi. *Perspektif Akuntansi*, 6(3), 1–21. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i3.p1-21>
- Desselle, S. P., & McKeirnan, K. C. (2019). The Value and Potential Integration of Pharmacy Technician National Certification Into Processes That Help Assure a Competent Workforce. *Pharmacy*, 7(4), 147. <https://doi.org/10.3390/pharmacy7040147>
- Elizamiharti, E. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *J. Ris. Multidisip. Inov. Tech.*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Estrada, C. A. M., Marian Fe Theresa C. Lomboy, Gregorio, E. R., Amalia, E., Leynes, C., Quizon, R. R., & Kobayashi, J. (2019). Religious Education Can Contribute to Adolescent Mental Health in School Settings. *International Journal of Mental Health Systems*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13033-019-0286-7>
- Fadli, I. (2023). Kualifikasi, Kompetensi, Dan Sertifikasi Guru Madrasah Di Kabupaten Maros. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 6(2), 118–127. <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.2.2023.2721>
- Fathuddin, F. (2023). The Challenges of Teaching Islamic Education in the Millennial Generation Era. *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.24239/ijcied.vol5.iss1.66>
- Fiqri, M. A., Sumijaty, S., & Shodiqin, A. (2020). Analisis Wacana Kritis Terhadap Film Munafik 2. *Tabligh Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), 57–76. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v5i1.1880>
- Gasa, F. M. (2019). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pernyataan Kontroversial Viktor Laiskodat. *Jurnal Sosial Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 8–14. <https://doi.org/10.33319/sos.v20i1.16>
- Haron, R., Mamat@Mustaffa, M., & Majid, M. A. (2019). Pembinaan Identiti Kepimpinan Dalam Wacana Politik (Leaderships Identity Development in Political Discourse). *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*, 35(4), 386–407. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2019-3504-24>
- Hartono, T., Masduki, M., & Romadi, P. (2020). The Da'i (Muslim Preachers) and Social Change Challenges: A Study of Da'i Professionalism in Dumai, Riau. *Afkaruna*, 16(1). <https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0113.58-81>
- Kaloi, M., Hopper, J. D., Hubble, G., Niu, M., Shumway, S. G., Tolman, E. R., & Jensen, J. L. (2022). Exploring the Relationship Between Science, Religion & Attitudes Toward Evolution Education. *The American Biology Teacher*, 84(2), 75–81. <https://doi.org/10.1525/abt.2022.84.2.75>



- kareem, A., & Shakir, A. (2023). Review: Verification Process of Academic Certificates Using Blockchain Technology. *Kirkuk University Journal-Scientific Studies*, 18(1), 62–75. <https://doi.org/10.32894/kujss.2023.135876.1072>
- Kharismatunisa, I. (2023). Innovation and Creativity of Islamic Religious Education Teachers in Utilizing Digital-Based Learning Media. *Scaffolding Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 5(3), 519–538. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v5i3.3700>
- Kolbi, N. A., Wijayanti, A., & Setiawan, A. (2020). Faktor-Faktor Tingkat Kelulusan Uji Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar. *Jas-Pt (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.333>
- Kustini, S. (2020). Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Keterampilan Multiliterasi. *Jurnal Intekna Informasi Teknik Dan Niaga*, 20(2), 86–94. <https://doi.org/10.31961/intekna.v20i2.892>
- Laeli, A. F., & Dzarna, D. (2022). Pelatihan Strategi Peningkatan Literasi Membaca Teks Digital (Reading Digital Text). *Dedication Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 213–220. <https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.787>
- Liu, Z. R., & Dzainudin, M. (2023). Exploring the Impact of Integrating the Nursery Teacher Certificate on Student Teachers' Teaching Competences in Teacher Education in Shaanxi, China. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(2). <https://doi.org/10.6007/ijarped/v12-i2/17316>
- Lopatofsky, T. M. (2023). The Perceived Impact of a Post-Secondary Education Program on Kenyan Catholic Sisters' Understanding of Their Lives as Women Religious. *Advancing Women in Leadership Journal*, 42, 132–146. <https://doi.org/10.21423/awlj-v42.a353>
- Mahastama, A. W. (2022). Model Berbasis Aturan Untuk Transliterasi Bahasa Jawa Dengan Aksara Latin Ke Aksara Jawa. *Jurnal Buana Informatika*, 13(02), 146–154. <https://doi.org/10.24002/jbi.v13i02.6526>
- Maknun, M. L., Muna, M. K., Prasetyo, A., & Eliza, M. (2021). Literasi Keagamaan Berbasis Inklusi Sosial Melalui Manajemen Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Perpustakaan. *Pusaka*, 9(2), 161–176. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v9i2.522>
- Munir, M. M. (2020). Peran Majelis Ta'lim Selaparang Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15(2), 105–118. <https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1633>
- Munthe, B., Sirait, T., Bangun, & Sihombing, S. (2023). The Role of the Teacher in Implementing Christian Religion Education in Growing Christian Faith for Early Age



- Children. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 2641–2649.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4484>
- Musahrain, M., Masitoh, S., Nursalim, M., & Afrianti, I. (2023). Peranan Filsafat Bahasa Terhadap Perkembangan Linguistik Terapan Dalam Dunia Pendidikan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1640–1645.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1403>
- Nugraha, D. (2022). Literasi Digital Dan Pembelajaran Sastra Berpaut Literasi Digital Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9230–9244.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.3318>
- Raharjo, N. P., & Winarko, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya Dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Komunika Jurnal Komunikasi Media Dan Informatika*, 10(1), 33.  
<https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3795>
- Rahayu, N. E. E. (2020). Minat Frontliners Bank Syariah Terhadap Sertifikasi Kompetensi Untuk Meningkatkan Kompetensi Keahlian (Studi Kasus Di Bank Syariah Anak Perusahaan Bank BUMN Dan UUS Bank BUMN Di Yogyakarta). *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1).  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.4859>
- Rahman, T., Aulia, A., & Winarsih, T. (2022). Peningkatan Literasi Media Digital Islami Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamantirto Kasihan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.18196/ppm.46.831>
- Rasminto, R. (2023). Analisis Problematika Tunjangan Profesi Terhadap Kesejahteraan Sosial Guru Di Indonesia. *Widyacarya Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya*, 7(2), 113.  
<https://doi.org/10.55115/widyacarya.v7i2.2427>
- Rhizky, D. P. (2021). Wacana Rasisme Dalam Film “Blindspotting.” *Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 41–50.  
<https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2600>
- Rizal, M. (2023). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 1121–1128.  
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>
- Rusdi, M. (2023). The Impact of Technology Use in Teaching and Understanding Religious Values on Students’ Moral Development in Islamic Schools in Indonesia. *The Eastasouth Journal of Learning and Educations*, 1(03), 123–134.  
<https://doi.org/10.58812/esle.v1i03.158>
- Sadikin, I. S. (2024). Menyongsong Memberdayakan Generasi Muda Digital Natives: Menggali Potensi Literasi Teknologi Melalui Aplikasi Dan Situs Web Pembelajaran Di SD



- Pusaka Rakyat 02. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(2), 517–526. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i2.776>
- Sai'dah, Z., Khitam, A. K., & Majid, S. M. (2022). Pelatihan Dakwah Digital Bagi Para Da'i Muda Di Komunitas Jamuspa Yogyakarta. *Abdine Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.242>
- Sandberg, K. J. (2020). Teaching for Social Impact: Integrating Generational Goals and Concerns Into Religious Education. *Journal of Religious Education*, 68(3), 417–434. <https://doi.org/10.1007/s40839-020-00109-3>
- Santiawan, N. I. N., & Supriyoko, N. (2022). Analisis Manajemen Pasraman Dalam Mewujudkan Sisywa Yang Cerdas Berbudaya Pada Pasraman Padma Bhuanasaraswati Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(3), 348–361. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i3.11730>
- Sobri, M., Supian, Daud, S. M., & Vahlepi, S. (2022). Pelatihan Guru Agama Berbasis Literasi Digital Kependidikan Di MTS Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. *Pendalas Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 204–214. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.160>
- Solichin, A., Masdarto, M., Khasanah, M., Abbas, M., Ma'aruf, S., & Kusmawati, H. (2023). Inovasi Pembelajaran PAI Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan PAI. *Journal on Education*, 5(2), 3990–3998. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1104>
- Sriyanti, L., & Ramadhani, L. R. (2021). Pembinaan Kepribadian Islami Dan Solidaritas Sosial Remaja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i2.11185>
- Suswandy, S. (2023). Meningkatkan Antusiasme Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 652–660. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.567>
- Sutadi. (2022). Wacana Pendidikan Keagamaan Buddha Berciri Kenusantara Di Lembaga Dharma Kalyana Jepara. *Journal of Scientech Research and Development*, 4(2), 467–477. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.118>
- Tholkhah, I. (2013). PENDIDIKAN TOLERANSI KEAGAMAAN: Studi Kasus SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v11i2.432>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>



- Wahyuni, T. S. (2021). *Kaitan Pembelajaran Bahasa Indonesia Dengan Lingkungan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/asby9>
- Wijaya, C., Nasution, T., Qadri, M. A., Fuadi, A., & Anwar, K. (2021). Persepsi Guru RA Ali Mahfudz Tentang Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 738–751. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1551>
- Wissang, I. O. (2023). INOVASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA MAHASISWA PRODI PBSI IKTL MELALUI LITERASI BUDAYA. *Pena Literasi*, 6(2), 186. <https://doi.org/10.24853/pl.6.2.186-198>
- Yahya, M. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam Di Era Digital: Implementasi Literasi Digital Dalam Pembelajaran Di Wilayah Banyumas. *Edukasia*, 4(1), 609–616. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.317>
- Yasa, I. W. S. (2023). Meningkatkan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Agama Hindu Di Pasraman. *Japam (Jurnal Pendidikan Agama)*, 3(02), 163–173. <https://doi.org/10.25078/japam.v3i02.2679>
- Yener, D. (2022). The Effects of Halal Certification and Product Features on Consumer Behavior. *International Journal of Management Studies*, 29. <https://doi.org/10.32890/ijms2022.29.2.5>

